

Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., C.N., M.M.



HUKUM INVESTASI

Penerbit



SINAR GRAFIKA



HUKUM INVESTASI

Investasi atau penanaman modal di era globalisasi dan perdagangan bebas memiliki peran yang signifikan untuk membangun perekonomian negara. Untuk mendukung kegiatan investasi, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang akan menjadi payung hukum yang jelas bagi investor dalam menanamkan modalnya.

Buku ini mengkaji investasi dari segi hukum ekonomi dan bisnis, yakni investasi langsung yang dasar hukumnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maupun investasi tidak langsung yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pembahasan meliputi makna investasi, pengaturan investasi dalam peraturan perundang-undangan, peranan dan pengaruh positif dan negatif investasi, serta bagaimana solusi masalah investasi tersebut. Dikaji juga penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kegiatan penanaman modal yang merupakan materi pelengkap yang sangat penting dalam perkembangan hukum investasi dewasa ini.

Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., C.N., M.M., saat ini menjabat sebagai ketua program Magister Hukum UJB Yogyakarta, serta dosen di beberapa Perguruan Tinggi, seperti Magister Hukum Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Uli Yogyakarta, UKSW Salatiga, UJB Yogyakarta, dan UAJ YKT. Beliau juga seorang praktisi yang hingga saat ini berpraktik sebagai Notaris dan PPAT. Kehadiran buku terbarunya ini diharapkan akan bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, praktisi hukum, ekonom, penegak hukum, serta semua pihak yang berkecimpung dalam dinamika hukum investasi.

ISBN 979-007-312-7



9 789790 073128

Hukum Investasi

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1 PENGERTIAN HUKUM INVESTASI	1
A. Apa itu Hukum Investasi	1
B. Kehadiran Investasi dalam Suatu Negara ...	3
C. Investasi Langsung dan Tidak Langsung	12
D. Doktrin Pasar Bebas	16
E. Pengaturan Investasi secara Tidak Langsung	23
BAB 2 MENGAPA NEGARA MAJU MENANAM- KAN MODALNYA DI NEGARA BERKEM- BANG?	25
A. Mengapa Indonesia Membutuhkan Modal Asing?	33
B. Manfaat Investasi	41
C. Asas-Asas yang Terkandung dalam UU PM	45
D. Syarat-Syarat untuk Menarik Modal Asing	47
1. Syarat Keuntungan Ekonomi (<i>Economic Opportunity</i>)	48

2. Syarat Stabilitas Politik (<i>Political Stability</i>)	52
3. Syarat Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>)	55

BAB 3 PERAN INVESTASI DALAM EKONOMI 63

A. Mengapa Investasi Turun?	67
B. Dampak Investasi Turun	70

BAB 4 ANATOMI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 72

A. Perbedaan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	80
1. Perbedaan-Perbedaan yang Pokok	88
2. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	95
B. Akibat Hukum dari Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	96
C. Akibat Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan	98
D. Dampak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terhadap Peraturan di Tingkat Menteri Perdagangan	101
E. Beberapa Catatan atas Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007	105

1. Pengaturan Penanaman Modal	105
2. Mekanisme Penanganan Penanaman Modal	106
3. Beberapa Istilah	106
4. Posisi Badan Koordinasi Penanaman Modal	108
 BAB 5 PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANG- AN INTERNASIONAL DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL	 109
A. Hubungan Saling Mempengaruhi antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hu- kum Penanaman Modal	113
B. Hal-Hal Pokok Kesepakatan Perdagangan Internasional	117
1. <i>Agreement on Trade Related Investment Measures (Agreement on TRIMs)</i>	117
2. <i>General Agreement on Trade in Services (GATS)</i>	122
 DAFTAR PUSTAKA	 125
 PROFIL PENULIS	 139